

Submitted: 28-11-2025 | Accepted: 03-12-2025 | Published: 01-01-2026

MEMBANGUN EKONOMI INKLUSIF MELALUI *GREEN ISLAMIC FINANCE*: PELUANG, TANTANGAN DAN REKOMENDASI

Reza Alfinandia Apridiany¹, Galih Wahyu Adi Nugroho²

Tsabitatul Mudhawamah³, Hudan Asyary⁴, Amalia Nuril Hidayati⁵

Prodi Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Uin Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung

Email: apridianyreza@gmail.com¹, galihwahyuadinugroho@gmail.com²
tsabitatulmudhawamah@gmail.com³, ablitar134@gmail.com⁴, amalianoerik@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peluang, tantangan, dan rekomendasi dalam membangun ekonomi inklusif melalui Green Islamic Finance di Indonesia, dengan fokus pada integrasi prinsip-prinsip keuangan syariah yang ramah lingkungan. Green Islamic Finance menunjukkan potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, namun dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat menghambat implementasinya. Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari temuan beberapa jurnal ilmiah, dan laporan resmi dari lembaga keuangan syariah terkait yang relevan dengan topik kajian ini. Temuan pada artikel ini menunjukkan bahwa Green Islamic Finance memiliki peluang signifikan dalam membangun ekonomi inklusif, didukung oleh regulasi yang semakin mendukung, inovasi produk keuangan syariah yang ramah lingkungan, serta kesadaran masyarakat Muslim terhadap isu-isu keberlanjutan. Namun demikian, terdapat tantangan utama seperti tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah, regulasi yang tidak jelas atau belum komprehensif, minimnya sosialisasi Green Sukuk. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan edukasi, penguatan regulasi, serta pengembangan model bisnis yang inovatif untuk mengoptimalkan potensi Green Islamic Finance dalam mencapai ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Green islamic finance, peluang, tantangan dan rekomendasi membangun ekonomi inklusif

Abstract

This study aims to explore opportunities, challenges, and recommendations in building an inclusive economy through Green Islamic Finance in Indonesia, with a focus on integrating environmentally friendly Islamic finance principles. Green Islamic Finance shows great potential in supporting sustainable development, but faces various challenges that can hinder its implementation. The data used as the basis for analysis is secondary data. Secondary data was obtained from findings in several scientific journals and official reports from Islamic financial institutions relevant to the topic of this study. The findings in this article show that Green Islamic Finance has significant opportunities in building an inclusive economy, supported by increasingly supportive regulations, innovations in environmentally friendly Islamic financial products, and Muslim community awareness of sustainability issues. However, there are major challenges such as low levels of Islamic finance literacy, unclear or incomplete regulations, and a lack of awareness of Green Sukuk. Recommendations include improving education, strengthening regulations, and developing innovative business models to optimize the potential of Green Islamic Finance in achieving an inclusive and sustainable economy.

Keywords: Green Islamic finance, opportunities, challenges, and recommendations for building an inclusive economy

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks perkembangan ekonomi global yang semakin menekankan nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, keuangan berbasis etika menjadi perhatian utama bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Sustainable finance atau keuangan berkelanjutan kini hadir sebagai paradigma baru yang memadukan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) dalam setiap pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan (OECD, 2020). Hal ini merupakan perjalanan strategis yang menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam menyatukan pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial, sejalan dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi baik di tingkat nasional maupun internasional (OJK, 2024).

Nur Hidayah

AN NAJAH (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan) Vol. 05 No.01 (Jauniari 2026)

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*mizan*), dan kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*) memberikan dasar moral dan spiritual bagi pembangunan yang berkelanjutan. Nilai-nilai ini kemudian terwujud dalam konsep *Islamic Green Finance*, yaitu sistem keuangan hijau berbasis syariah yang tidak hanya menekankan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi kesejahteraan sosial serta pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, *green financing* menjadi solusi strategis untuk mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.

Kemajuan pesat keuangan Islam melahirkan berbagai instrumen inovatif seperti *sukuk* dan *Islamic microfinance*, yang berperan penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi secara global. *Pasca Paris Agreement* tahun 2015 (COP21), dunia mulai beralih menuju sistem pembiayaan hijau (*green finance*) sebagai upaya mengatasi perubahan iklim dan mewujudkan ekonomi rendah karbon. OECD (2017) mencatat peningkatan signifikan pada investasi hijau, termasuk munculnya *green sukuk* yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan tujuan keberlanjutan.

Hubungan antara prinsip Islam dan keberlanjutan tampak jelas dalam kesamaan visi untuk menciptakan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan serta mengelola sumber daya secara bijaksana demi kemaslahatan bersama. Konsep *Maqāṣid Syariah*, yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi dasar penting bagi inovasi pembangunan yang selaras dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Di Indonesia, komitmen terhadap keuangan berkelanjutan diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis, seperti penerbitan *Green Sukuk* sejak tahun 2018. Kebijakan ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, seperti pengembangan energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca sebagai penerbit *Sovereign Sukuk* terpercaya dan terus melakukan inovasi. Meski demikian, pelaksanaan green sukuk masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk lemahnya regulasi, rendahnya literasi masyarakat terkait green sukuk, minimnya sosialisasi. Oleh karena itu, artikel ini akan mengulas peluang, tantangan dan rekomendasi *Islamic Green Finance* di Indonesia sebagai upaya membangun sistem ekonomi yang inklusif, etis, dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama adalah mengkaji secara kritis dan mendalam bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan topik, seperti buku, jurnal, dokumen, majalah, dan sumber lainnya. Hal ini memungkinkan pengumpulan informasi dan data tanpa perlu pengumpulan data primer langsung di lapangan, sesuai dengan karakteristik penelitian kepustakaan yang menekankan analisis literatur untuk menghasilkan wawasan deskriptif.

C. HASIL DAN PEMABAHASAN

1. Peluang Pembiayaan Berkelanjutan *Green Islamic Finance* Melalui Green Sukuk

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan dengan prinsip syariah dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, serta pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Pada posisi Desember 2022, jumlah LKMS mencapai 81 instansi atau 34% dari jumlah total industri LKM, dengan nilai aset dan pembiayaan LKMS mencapai Rp570,06 miliar dan Rp246,58 miliar.(OJK, 2022).

Green Islamic Finance menawarkan peluang signifikan untuk mendorong ekonomi inklusif melalui beberapa aspek utama, seperti pesatnya perkembangan pasar obligasi hijau global dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Keuangan dapat melihat peluang untuk mengembangkan instrumen baru dan inovatif guna membiayai proyek hijau. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mengembangkan Kerangka *Green Bond* dan *Sukuk Hijau Framework* yang mengatur pengelolaan dan penggunaan dana, kelayakan dan kriteria proyek, serta mekanisme pelaporan obligasi hijau/sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah.

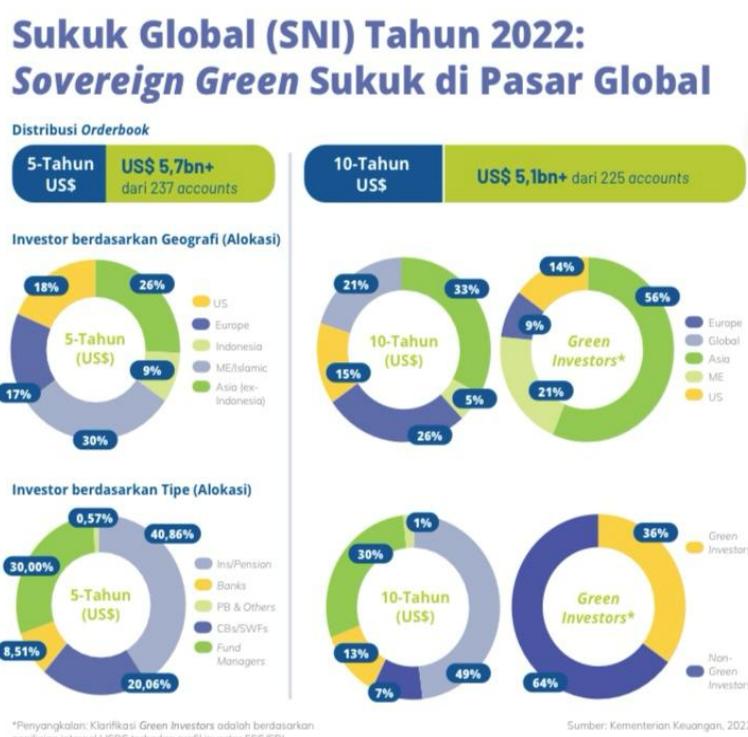
Instrumen Pasar Modal syariah memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai produk investasi syariah berwawasan lingkungan yang dapat mendanai pembangunan berkelanjutan, salah satunya *Green Sukuk*. Melihat perkembangan tren positif di pasar saat ini, sukuk diperkirakan akan terus

berkembang di tahun-tahun mendatang. Meningkatnya penerimaan investasi berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG) oleh investor, serta sektor bisnis, telah menciptakan peluang bagi Pemerintah sebagai penerbit sukuk negara untuk memanfaatkan tren ini melalui penerbitan *Green Sukuk* maupun *Sosial Sukuk* seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS).

Keberhasilan penerbitan Sukuk Negara sejalan dengan upaya pengembangan pasar secara berkesinambungan sebagai upaya untuk menciptakan pasar Sukuk Negara yang aktif, dalam, dan likuid. Berbagai infrastruktur pendukung penerbitan Sukuk Negara telah ditingkatkan, seperti kerangka hukum penerbitan dan pengelolaan, struktur sukuk dan *underlying asset*, metode penerbitan dan jenis instrumen, serta perkembangan pasar dan basis investor, baik domestik maupun internasional.

Data berikut menunjukkan perkembangan distribusi Orderbook dan profil investor dari Sukuk Global (SNI) tahun 2022, yang menegaskan posisi Indonesia sebagai penerbit Green Sukuk terbesar di dunia di tahun tersebut

Gambar 1. Distribusi Orderbook dan Profil Investor Sukuk Global (SNI) Tahun 2022 Sovereign Green Sukuk di Pasar Global



(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Negara 2022)

Dari *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia* (OJK, 2022), di tengah-tengah kondisi pasar yang menantang, Pemerintah sukses melakukan transaksi penjualan Global Sukuk sebesar US\$3,25 miliar, yang terdiri atas US\$1,75 miliar dengan tenor 5 tahun dan US\$1,5 miliar dengan tenor 10 tahun (seri green dengan akad wakalah yang jatuh tempo pada tahun 2027 dan 2032). Transaksi tersebut menarik minat yang besar dari beragam jenis investor dari berbagai geografi, yang menunjukkan minat investasi yang kokoh untuk Indonesia dikarenakan dukungan investor yang berkelanjutan dan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat.

Dana hasil penjualan green sukuk ini nantinya akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek yang masuk dalam kategori green. Berdasarkan panduan umum yang telah disusun pemerintah, beberapa proyek yang dikategorikan green meliputi efisiensi energi dan *renewable energy*, *green building*, *green tourism*, *disaster risk reduction*, *sustainable transport*, *waste to energy* dan *waste management*, *sustainable management natural resources* serta *sustainable agriculture*. Berikut adalah hasil analisis mengenai peluang-peluang yang dapat mendorong implementasi green sukuk di Indonesia berdasarkan kajian studi literatur:

Potensi Pasar Keuangan Syariah

Pasar keuangan berbasis syariah, khususnya pada sektor investasi, telah diminati oleh masyarakat di seluruh dunia sebagaimana yang terjadi di negara-negara Timur Tengah. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia memiliki potensi untuk mengembangkan pasar keuangan syariah dalam perekonomian global. Salah satu instrumen keuangan syariah yang saat ini tengah digemborkan oleh pemerintah adalah *Green Sukuk*. Green sukuk masih menjadi instrumen unggulan pemerintah karena penerbitan perdananya pada Maret 2018 memperoleh tanggapan yang sangat baik dari pasar. Keberhasilan tersebut mendorong pemerintah untuk kembali merencanakan penerbitan green sukuk pada tahun-tahun berikutnya.

Hal serupa juga terdapat pada penelitian (Anik, 2017), yang menyatakan bahwa kondisi selama ini menunjukkan bahwa pasar akan bertindak sangat responsif terhadap penerbitan sukuk, hampir seluruh sukuk yang diterbitkan, diserap oleh pasar, dan bahkan menimbulkan kelebihan demand, terutama sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah. Baik di bank nasional maupun internasional, instrumen sukuk tumbuh dengan pesat seiring dengan pertumbuhan instrumen keuangan yang lainnya. Disamping itu, sebagai negara pertama yang menerbitkan sukuk hijau, Indonesia memiliki peluang yang baik untuk mengembangkan green sukuk dalam memperkokoh posisi keuangan syariah di perekonomian global.

Kesadaran Investor akan Isu Lingkungan

Potensi pasar keuangan syariah di Indonesia juga dikarenakan mulai munculnya kesadaran investor akan isu lingkungan maupun perubahan iklim. Penerbitan Green Sukuk berpotensi untuk menjadi sarana pengembangan basis investor karena hingga saat ini telah berkembang investor individu maupun investor korporasi yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan, khususnya dalam menghadapi dampak perubahan iklim (Anggraini, 2018). Hal ini tercermin pada disambut baiknya kehadiran Green Sukuk di Indonesia oleh investor. Green Sukuk dapat memfasilitasi sekaligus menjangkau pasar secara lebih luas dengan menggaet investor konvensional yang mencari investasi dengan tanggung jawab sosial dan beretika (Karina, 2019).. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk kembali menerbitkan sukuk hijau pada tahun berikutnya sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya peningkatan partisipasi investor. Hal inilah menjadi insentif bagi pemerintah untuk terus melanjutkan penerbitan sukuk hijau pada periode-periode selanjutnya.

Peran Green Sukuk Terhadap Pembangunan

Sukuk merupakan surat berharga semacam obligasi yang mencatat mengenai kepemilikan aset oleh investor dan diterbitkan baik oleh perusahaan maupun Negara (Latifah, 2020). Tujuan dari adanya pengembangan sukuk di Indonesia salah satunya yaitu untuk menyelaraskan program-program pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah memiliki tujuan atas penerbitan sukuk negara sebagai sarana pembiayaan negara dalam APBN yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Disamping itu, adanya green sukuk juga memudahkan masyarakat dalam berpartisipasi untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Pendanaan pembangunan nasional melalui instrumen sukuk dinilai lebih menguntungkan dibandingkan pinjaman langsung.

Dari sudut pandang kesetaraan dan kedaulatan nasional, pinjaman langsung kerap disertai persyaratan dari negara donor yang berpotensi merugikan Indonesia, sebagaimana terlihat pada pengalaman sebelumnya. Selain itu, status Indonesia sebagai negara debitur seringkali menempatkannya pada posisi yang kurang kuat dalam diplomasi internasional. Kondisi ini berbeda dengan penerbitan sukuk, di mana hubungan antara Indonesia dan para investor berlangsung lebih setara. Risiko intervensi luar yang merugikan pun dapat ditekan, sehingga Indonesia memiliki kendali yang lebih besar terhadap pengelolaan sumber daya.

2. Tantangan Pembiayaan Berkelanjutan *Green Islamic Finance* Melalui Green Sukuk

Meskipun *Green Islamic Finance* memiliki prospek yang positif, instrumen ini diperkirakan masih akan menghadapi sejumlah tantangan di masa depan. Pengembangan pembiayaan ramah lingkungan di Indonesia juga masih menemui berbagai hambatan.

Rendahnya Literasi Masyarakat Terkait Green Sukuk

Perkembangan keuangan syariah dituntut untuk terus melakukan inovasi agar terus menarik. Para pelaku usaha baik investor maupun masyarakat itu sendiri. Perkembangan yang cepat perlu juga dengan diimbangi oleh para ahli yang memahami praktik praktik khususnya green sukuk itu sendiri. Literasi keuangan syariah yang masih rendah, khususnya di kalangan generasi Z. Berdasarkan data *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*, literasi keuangan syariah mencapai 39,11 persen, sedangkan inklusi keuangan syariah hanya 12,88 persen. Peningkatan sumberdaya ini bisa diperoleh melalui banyak sektor diantaranya sekolah-sekolah formal, pelatihan berkelanjutan dan program edukasi lainnya.

Regulasi yang Tidak Jelas atau Belum Komprehensif

Regulasi yang tidak jelas atau belum memadai merupakan salah satu tantangan utama dalam pengembangan green sukuk di Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait sukuk hijau, regulasi tersebut masih dianggap belum sepenuhnya mendukung pengembangan pasar sukuk hijau yang optimal. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan dalam peraturan yang mengatur aspek transparansi dan standar yang harus dipenuhi oleh proyek-proyek yang didanai melalui green sukuk.

Penerbitan sukuk hijau memerlukan standar yang jelas mengenai kriteria proyek hijau yang dibiayai, termasuk pengawasan terhadap implementasi proyek tersebut untuk memastikan dampak positif yang diharapkan terhadap lingkungan. Regulasi yang kurang tegas tentang kriteria proyek hijau ini dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan penerbit sukuk dan bank syariah yang hendak berinvestasi. Hal ini dapat berakibat pada rendahnya minat bank syariah untuk berinvestasi dalam sukuk hijau, karena mereka tidak yakin apakah proyek yang dibiayai benar-benar memenuhi standar keberlanjutan yang diinginkan.

Minimnya Sosialisasi Green Sukuk Green

Sukuk merupakan produk alternatif dari pendanaan investasi berupa sukuk, dimana green sukuk berfokus kepada pendanaan yang berbasis ramah lingkungan. Masih sangat banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui dan memahami konsep dari green sukuk itu sendiri. Sehingga, menyebabkan kesulitan untuk meyakinkan investor bahwa dana sukuk akan digunakan untuk proyek dengan nilai ekonomi, namun memenuhi standar "bijan" dan kredibel. Hal tersebut tidak lepas dari ruang sosialisasi yang masih terbatas pada para investor yang memiliki dana lebih dari cukup. Hal ini menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus mensosialisasikan green sukuk diluar emiten-emiten, universitas dan acara seminar. Karakteristik Investor Dengan masih minimnya sosialisasi dan juga pemahaman tentang green sukuk sulit rasanya untuk bisa meyakinkan para investor untuk dapat bergabung menjadi penyokong dana di berbagai sektor pendanaan green sukuk. Terlebih karakteristik dari investor yang cenderung beragam cukup menjadi pekerjaan tambahan supaya konsep green sukuk bisa diterima dengan jelas kepada para investor.

Karakteristik Investor

Dengan masih minimnya sosialisasi dan juga pemahaman tentang green sukuk sulit rasanya untuk bisa meyakinkan para investor untuk dapat bergabung menjadi penyokong dana di berbagai sektor pendanaan green sukuk. Karakteristik investor sukuk hijau mungkin berbeda dengan investor Islam, yang mungkin mendominasi pangsa pasar. Terlebih karakteristik dari investor yang cenderung beragam cukup menjadi pekerjaan tambahan supaya konsep green sukuk bisa diterima dengan jelas kepada para investor. Umumnya, sukuk hijau sangat diminati oleh investor karena mempromosikan kegiatan hijau yang memberikan citra yang baik bagi investor. Ini akan mendukung masalah perubahan iklim. Akan tetapi Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak kondisi selama periode penawaran kelebihan permintaan, tidak selalu berkorelasi dengan kinerja setelah

periode penerbitan sukuk hijau. Penurunan harga sukuk hijau Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi makro sehingga citra baik kegiatan hijau tidak selalu menarik investor secara langsung. Masalah perubahan iklim mungkin bukan pertimbangan pertama karena investor hanya mencari motif keuntungan. Namun, di pasar sekunder, banyak faktor yang dapat memengaruhi investor membeli atau menjual obligasi hijau. Pada gilirannya, ini akan mempengaruhi kinerja obligasi hijau (Siswantoro, 2018). Selain itu ada beberapa tantangan menurut OJK tentang Green Sukuk di Indonesia, diantaranya:

1. Kurangnya lembaga keuangan dalam mengidentifikasi risiko yang dapat berdampak pada lingkungan karena kapasitas kewenangan yang terbatas.
2. Kurangnya kesadaran lembaga keuangan menyebabkan tingginya risiko dan kurangnya peran pemerintah dalam menangani proyek ramah lingkungan.
3. Kurangnya kesadaran lembaga keuangan menyebabkan tingginya risiko dan kurangnya peran pemerintah dalam menangani proyek ramah lingkungan.
4. Kurangnya dukungan dari perbankan dalam mendukung proyek ramah lingkungan.

3. Analisis Contoh Kasus Green Sukuk Hijau Malaysia

Sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 2017, green sukuk telah menjadi bagian penting dari ekosistem keuangan berkelanjutan global, khususnya di negara-negara dengan populasi Muslim besar. Green sukuk merupakan inovasi dalam instrumen keuangan Islam yang memadukan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Secara historis, Malaysia menjadi pelopor penerbitan green sukuk di dunia melalui *Tadau Energy Sdn Bhd* pada tahun 2017. Penerbitan tersebut menandai lahirnya obligasi hijau pertama yang sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dan sekaligus berfokus pada proyek energi terbarukan. Pada Januari 2017, Bank Dunia, Bank Sentral Malaysia (Bank Negara), dan Komisi Sekuritas Malaysia membentuk kelompok kerja teknis untuk menjelajahi opsi pengembangan pasar keuangan Islam hijau di Malaysia dan mendorong investasi dalam proyek-proyek hijau atau berkelanjutan.

Departemen Keuangan Bank Dunia bergabung dalam kelompok kerja sebagai ahli teknis. Bank Dunia mengidentifikasi peluang untuk memanfaatkan peran Malaysia dalam keuangan Islam untuk menciptakan produk keuangan iklim baru yang menggabungkan instrumen sukuk dan obligasi hijau. Setelah diinisiasi oleh Malaysia dengan penerbitan sukuk hijau pertama tahun 2017 senilai 250 juta RM, kemudian disusul Indonesia pada tahun 2018 menerbitkan sukuk negara terbesar senilai 1,25 miliar USD (*World Bank Group*, 2019).

Berikut adalah data evolusi pasar obligasi dan sukuk hijau global



Sumber: World Bank Group, 2019

Gambar 1. Evolusi pasar obligasi dan sukuk hijau global

Meskipun potensi pembiayaan hijau syariah sangat besar, banyak penelitian menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki potensi untuk meningkatkan PDB dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Ahmed, 2020; Haron, 2019). Namun, masih terdapat kesenjangan literatur yang komprehensif mengenai dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang, terutama dalam studi komparatif lintas negara-negara anggota *Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)* seperti Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab (UEA) yang memiliki sistem keuangan syariah yang berkembang (Mariana et al., 2024; World Bank Group, 2019).

Bukti utama kesuksesan proyek ini adalah bahwa penerbit lain Quantum Solar segera mengikuti dengan penerbitan yang lebih besar (RM 1 miliar). Hingga Desember 2018, dua sukuk hijau lainnya dan satu obligasi hijau telah diterbitkan di Malaysia. Lembaga pemeringkat lokal (*RAM Ratings dan Malaysian Rating Corporation Berhad*) serta *Green Technology Corporation* telah mengembangkan metodologi untuk meninjau kerangka kerja sukuk hijau sesuai dengan praktik terbaik internasional. Sebagai akibat dari penerbitan di Malaysia, negara-negara Islam lainnya mulai menjajaki kemungkinan memanfaatkan pasar modal Islam untuk investasi iklim berkelanjutan, termasuk Indonesia, yang menerbitkan sukuk hijau sovereign pertama di dunia pada Februari 2017.

Indonesia juga menjadi pionir dalam penerbitan green sukuk berdaulat dan hingga kini tetap memimpin pasar dalam volume dan inovasi struktur sukuk hijau. Sejak 2018 hingga 2024, pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa seri sukuk hijau dengan total nilai lebih dari USD 5 miliar. Dana tersebut digunakan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan seperti pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, instalasi mikrohidro di pedesaan, efisiensi energi di gedung pemerintah, serta pengadaan transportasi umum rendah emisi. Laporan dari Kementerian Keuangan dan *Climate Bonds Initiative* menunjukkan bahwa proyek-proyek tersebut berkontribusi pada pengurangan lebih dari 11 juta ton emisi karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) serta penciptaan ribuan lapangan kerja hijau (Khan & Ahmad, 2022). Efektivitas ini menjadikan Indonesia sebagai studi kasus penting dalam menilai dampak nyata dari green sukuk dalam konteks pembangunan berkelanjutan di negara berkembang.

4. Rekomendasi Pembiayaan Berkelanjutan *Green Islamic Finance*

Untuk mendorong terciptanya ekosistem pembiayaan yang lebih hijau membutuhkan strategi dan rekomendasi yang tepat, diantaranya:

Peningkatan Kesadaran dan Edukasi

Peningkatan kesadaran dan edukasi melalui kampanye dan program edukasi, pemerintah berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku pasar tentang pentingnya investasi hijau. Dan melakukan edukasi dengan memberikan informasi mengenai manfaat green sukuk dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Menyediakan informasi dan pelatihan bagi investor dan pengembang proyek tentang cara mengakses dan memanfaatkan green sukuk. Mengintegrasikan topik *green sukuk* ke dalam kurikulum keuangan dan ekonomi di universitas dan sekolah bisnis. Upaya ini berpotensi melahirkan generasi profesional keuangan yang memiliki keahlian dalam strategi investasi berkelanjutan. Selain itu, pengembangan kursus atau webinar berbasis online yang memberikan pelatihan menyeluruh mengenai green sukuk dapat menjadi solusi untuk menjangkau peserta yang lebih luas serta menawarkan metode pembelajaran yang lebih fleksibel.

Penguatan Regulasi

Salah satunya adalah penerbitan regulasi yang mengharuskan setiap sukuk hijau yang diterbitkan untuk mengikuti *Climate Bonds Initiative (CBI)* sebagai standar sertifikasi hijau. Standar ini memberikan jaminan bahwa dana yang dihimpun dari penerbitan sukuk hijau benar-benar digunakan untuk proyek-proyek yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sertifikasi hijau seperti yang diberikan oleh CBI berfungsi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana sukuk. Sertifikat ini juga memberikan jaminan bahwa proyek yang dibiayai oleh sukuk hijau tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan.

Tanpa adanya regulasi yang mendukung sertifikasi hijau, investor mungkin akan ragu untuk berinvestasi dalam sukuk hijau, karena kurangnya kejelasan tentang tujuan dan dampak proyek tersebut. Oleh karena itu, regulasi yang mendorong transparansi dan standarisasi dalam penerbitan sukuk hijau sangat penting untuk menciptakan pasar yang sehat dan kredibel.

Selain itu, regulasi yang mendorong penggunaan standar internasional juga dapat meningkatkan integrasi pasar sukuk hijau Indonesia dengan pasar global. Hal ini membuka peluang bagi bank syariah untuk menarik investasi asing yang tertarik dengan instrumen investasi yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Dengan demikian, regulasi yang memfasilitasi penerbitan sukuk hijau sesuai dengan standar internasional berperan penting dalam memperluas pasar sukuk hijau di Indonesia.

Pengembangan Model Bisnis yang Inovatif

Inovasi digital bernama *G-Waqf. Aplikasi* ini digagas sebagai terobosan baru dalam pengelolaan green waqf atau wakaf hijau, sebuah instrumen filantropi Islam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Lahir dari keresahan terhadap isu perubahan iklim, deforestasi, serta krisis energi dan air bersih, aplikasi G-Waqf hadir untuk menjembatani masyarakat agar dapat berkontribusi nyata melalui wakaf berbasis digital.

G-Waqf juga telah melalui tahap uji kelayakan media dan materi, serta mendapatkan dukungan positif dari berbagai pihak, termasuk akademisi, dan komunitas lokal. Melalui *G-Waqf*, Marlita dan Anisa berharap dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam wakaf hijau sekaligus mendorong tercapainya *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya pada aspek energi bersih, iklim, dan lingkungan berkelanjutan.

Kolaborasi Antar Sektor

Pentingnya penggunaan teknologi seluler pada kehidupan sehari-hari dalam menghubungkan masyarakat serta bisnis di seluruh Indonesia dan untuk mencapai itu perlu adanya kolaborasi agar ekosistem yang ada dapat berkembang untuk menjadi Indonesia bangsa digital masa depan. Sinergi antara pemerintah, regulator perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk memperkuat strategi nasional dalam mendorong green banking dan mengatasi isu ketahanan pangan dan dampaknya juga telah dibahas oleh berbagai organisasi internasional. Kolaborasi ini dapat mencakup pertukaran informasi, pengembangan kebijakan bersama, serta inisiatif kolektif untuk mempercepat adopsi keuangan berkelanjutan. Misalnya bank, menyalurkan kredit hijau kepada perusahaan yang mengembangkan energi terbarukan atau industri ramah lingkungan.

5. KESIMPULAN

Green Islamic Finance memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Instrumen seperti green sukuk terbukti mampu menjadi sumber pendanaan efektif bagi proyek-proyek ramah lingkungan, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan sumber daya alam. Peluang pengembangan instrumen ini juga didorong oleh meningkatnya kesadaran investor terhadap isu lingkungan, potensi besar pasar keuangan syariah, serta dukungan regulasi pemerintah melalui penerbitan berbagai kebijakan seperti *Green Bond and Sukuk Framework*. Namun demikian, implementasi *Green Islamic Finance* masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai green sukuk, regulasi yang belum komprehensif, minimnya sosialisasi, serta karakteristik investor yang beragam dan cenderung berorientasi pada keuntungan finansial semata. Kondisi ini menghambat optimalisasi peran keuangan syariah dalam pembiayaan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penguatan sektor ini memerlukan beberapa langkah strategis, antara lain peningkatan edukasi publik, penguatan regulasi melalui standar internasional, inovasi model bisnis seperti pengembangan *Green Waqf* digital, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Jika tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi, *Green Islamic Finance* berpotensi besar menjadi pilar utama dalam menciptakan ekonomi yang inklusif, etis, dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah di Indonesia.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Otoritas Jasa Keuangan. 2022. *Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diakses dari: <https://www.ojk.go.id>
- OECD (2020), *OECD Business and Finance Outlook 2020: Sustainable and Resilient Finance*, OECD Publishing, Paris. Diakses dari <https://doi.org/10.1787/eb61fd29-en>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Sustainable Finance Information Hub (SFIH)*. Diakses dari <https://ojk.go.id/keuanganberkelanjutan>
- Idris, H. A. (2016). *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*. Deepublish.
- Permana, M. (2021). *Degradasi Lingkungan: Pendekatan Kajian Pembangunan yang Berkelanjutan*. Nas Media Pustaka.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). *Green bonds: Mobilising the debt capital markets for a low-carbon transition*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264271073-en>
- Höhne, N.; Khosla, S.; Fekete, H.; Gilbert, A. *Pemetaan Keuangan Hijau yang Dilaksanakan oleh Anggota IDFC pada Tahun 2011 ; Ecofys*: Utrecht, Belanda, 2012. [Google Scholar]
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Implementasi Green Finance. Direktorat Jenderal Perbendaharaan – KPPN Watampone*. Diakses dari <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/profil/189-berita/3656-implementasi-green-finance.html>
- Sari, R. N. I. (2017). *Shariah Enterprise Theory sebagai Alat Analisis. Pengimplementasian Corporate Social Responsibility (Tesis)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sugiarto, I. (2025). Pengantar Ekonomi Islam. CV. Intake Pustaka. https://books.google.co.id/books?id=bM9IEQAAQBAJ&redir_esc=y
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022: Pemberdayaan Ekosistem Ekonomi Syariah dan Digitalisasi untuk Penguatan Keuangan Syariah dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional*. Departemen Perbankan Syariah, OJK. Diakses dari www.ojk.go.id
- Anik, I. E. P., 2017. Pengembangan Instrumen Sukuk Dalam Medukung Pembangunan Infratruktur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(03), pp. 173-180.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024. OJK** Diakses dari [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-\(SNLIK\)-2024/Survei%20Nasional%20Literasi%20dan%20Inklusi%20Keuangan%20\(SNLIK\)%202024.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-(SNLIK)-2024/Survei%20Nasional%20Literasi%20dan%20Inklusi%20Keuangan%20(SNLIK)%202024.pdf)
- Siswantoro, D. (2018). Performance of Indonesian green sukuk (Islamic bond): A sovereign bond comparison analysis, climate change concerns? *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 200
- World Bank Group. (2019). *Islamic Green Finance: Development, Ecosystem and Prospects. Securities Commission Malaysia*. Diakses dari <https://documents1.worldbank.org/curated/en/591721554824346344/pdf/Islamic-Green-Finance-Development-Ecosystem-and-Prospects.pdf>
- Mariana, Kukuh Tondoyekti, & Fachrozi. (2024). Ekonomi Hijau dan Bisnis Syariah: Mempromosikan Bisnis Yang Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*, 4(2), 873–882. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i2.4071>

Nur Hidayah

AN NAJAH (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan) Vol. 05 No.01 (Jauniari 2026)

- Khan, N., & Ahmad, T. (2022). DCarbonX decentralised application: carbon market case study. *ArXiv Preprint ArXiv:2203.09508*.
- Karina, L. A. (2019). Peluang dan tantangan perkembangan Green Sukuk di Indonesia. *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 2(0), 259–265. Diakses dari : <https://journal.uji.ac.id/CIMAE/article/view/14165/9772>
- Anggraini, Y., 2018. Peran Green Sukuk Dalam Memperkokoh Posisi Indonesia Di Pasar Keuangan Syariah Global. el Barka: *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(02), pp. 251-268.
- Latifah, S. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 421. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369>